


PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

Nissa Anggit Pratiwi¹



¹ Universitas Padjajaran,
Magister Akuntansi/Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Jl. Japati
No.2, Lebakgede, Kec. Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Telp: 022 2535172, Faks: 022
2535185

Korespondensi: 
¹ nissa.anggit22@gmail.com

Artikel ini tersedia dalam:
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI:10.31955/mea.vol3.iss2.pp1
05-120

Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2019

e-ISSN: 2621-5306
p-ISSN: 2541-5255

How to Cite:

Pratiwi, N. (2019). PENGARUH
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL.
*Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,
Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2),
105-120

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah
MEA (Manajemen, Ekonomi, &
Akuntansi)



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRAK: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan asli daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer dari pusat terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun data penelitian yang diambil adalah 318 kabupaten dan kota yang tersebar di Indonesia yang diperoleh dari data sekunder yaitu dari Direktorat Jenderal Primbangan Keuangan Departemen Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal pada periode 2012-2014. Data tersebut akan dianalisis melalui uji asumsi klasik untuk memaksimalkan keakuratan dalam pengelolaan data. Sedangkan dalam menguji hipotesis menggunakan analisis regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh terhadap belanja modal, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Ini mengindikasikan bahwa PAD dan DAU yang besar dalam proporsi penerimaan daerah sangat mampu berpengaruh pada alokasi belanja modal

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal*

ABSTRACT: *This study aims to determine the influence of local revenue (PAD) and the general allocation fund (DAU) with capital expenditure on local governments throughout West Java province fiscal year 2014. The data used in this study is the financial report on Local Government Se-Java west of Fiscal Year 2014.*

The data collection of research was carried out by means of study documentation and methods used are descriptive verification. Engineering samples are used are saturated sampling as many as 27 local governments of the city and county level. The analytical method used is multiple linear regression analysis, then this hypothesis was tested using a t-test with IBM SPSS 20 for windows.

Based on the partial results of statistical tests found that the variable (X₁) Revenue (PAD) to variable (Y) Capital expenditures have a positive impact amounting to 42.25% and (X₂) General Allocation Fund (DAU) to variable (Y) Capital Expenditure have a positive effect amounting to 31.04%. Simultaneously revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) to give effect to the 73.3% Capital Expenditure on Local Government Se-West Java Province for Fiscal Year 2014. The remaining 26.7% is influenced by other factors that are ignored by author.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010: 36) “Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah”.

Harianto dan Adi mengutarakan (2007:2) :

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Dengan adanya pelayanan publik yang baik, akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 “Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014”.

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa belanja modal tidak pernah menyentuh 30% seperti yang pemerintah pusat syarkan. Rata-rata yang digunakan oleh belanja modal hanya 23,81 dari total belanja daerah dan tiap tahun belanja modal tidak pernah menyentuh angka 30%. Dapat dilihat pada tahun 2012 belanja modal hanya 22,30% dari total

belanja kemudian meningkat pada tahun 2013 sebesar 26,29 tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 22,83%. Disebabkan karena pemerintah daerah tidak memprioritaskan belanja modal, yang mana belanja modal sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan setiap daerah. Belanja modal mendapatkan komposisi yang lebih kecil dibanding belanja operasi. Itu menyebabkan belanja modal selalu berada dibawah 30%.

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya penyerapan anggaran belanja modal tersebut di atas adalah jeleknya infrastruktur yang sudah ada dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru, belum terbangunnya infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan pengolahan air bersih menyebabkan para investor swasta baik swasta nasional maupun asing enggan berinvestasi di daerah yang berpotensi ekonomi tinggi di luar Jawa, ujung-ujungnya perekonomian daerah tersebut selamanya akan tergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian setiap daerah akan terus rendah, itu adalah sebagian besar akibat belanja rutin pemerintah.

Untuk membangun suatu daerah dibutuhkan belanja modal sesuai kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Menurut Mardiasmo, (2012:167) : Akan lebih baik jika alokasi belanja daerah pemda di daerah lebih banyak digunakan untuk belanja modal yang berorientasi publik, sebab sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya kesenjangan fiskal yang dihadapi daerah . Diharapkan dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal maka akan menstimulasi perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif, yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah sehingga kapasitas fiskal dapat meningkat kembali dan kesenjangan fiskal dapat diminimalisir. ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Namun faktanya penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan

daerah. Untuk alokasi belanja modal, daerah juga membutuhkan dana tambahan yang berupa dana perimbangan. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi umum sebagai transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang direalisasikan melalui Belanja Modal.

Menurut Halim (2004 : 160)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Sidik et al (dalam harianto dan Adi, 2007) menyatakan bahwa:

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintahan pusat mengharapkan daerah dapat mengelola daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhan (2013) dan Darwanto, Yulia (2007) dan Astri Novianti memiliki kesimpulan PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus (2013) memiliki hasil yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, itu karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/ belanja operasional. sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal karena provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja

yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dari hasil beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal masih mempunyai hasil yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan berpengaruh, ada juga yang mengatakan tidak berpengaruh. Karena hasil dari penelitian diatas masih memiliki hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu peneliti berniat untuk mengangkat penelitian kembali tentang PAD, DAU dan Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, fenomena-fenomena yang bersumber dari data di lapangan, serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan objek yang lebih luas yaitu kota dan kabupaten se-Indonesia maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal"

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran PAD, DAU dan Belanja Modal pada seluruh kota dan kabupaten di Indonesia
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada seluruh kota dan kabupaten di Indonesia
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada seluruh kota dan kabupaten di Indonesia

TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia, menandai adanya perubahan pemerintahan dalam wewenang yang bermula berpusat ditangan pemerintah pusat, kini bersifat desentralisasi atau melimpahkan sebgaiian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Aspek utama kebijakan otonomi daerah adalah otonomi ekonomi yang didalamnya terdapat kewenangan keungan daerah yang sangat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Karena untuk pembiayaan pembangunan daerah dalam belanja daerah dapat memanfaatkan pendapatan daerah yang terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (Bastian 2006. Hal tersebut disimpulkan bahwa semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin tinggi pula kemungkinan kegiatan atau program yang dapat dilaksanakan. Seperti kutipan dalam UU no. 32 Tahun 2004 pasal 169 yang menyatakan bahwa:

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Untuk menjalankan tugas pemerintahan, harus memiliki sumber dana atau pendapatannya. Di era pelaksanaan desentralisasi ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat yang direalisasikan dalam Belanja Daerah. Belanja Daerah pada APBD mempunyai peran riil dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan sekaligus sebagai stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasikan dengan baik. Dikemukakan oleh Taufik Akbar (2012:43) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri dan kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari pajak daerah, redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Merujuk pada konsep tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran Pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

Akan tetapi setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah

pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peningkatan transfer Dana Alokasi Umum di pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia setiap tahunnya tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal.

Diperkuat oleh hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Prakosa (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Askam Tuasikal (2008) menyatakan bahwa “DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia”

Ideal seharusnya Belanja Daerah yang direalisasikan dalam belanja modal dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas (Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah 2013).

HIPOTESIS

Pengertian hipotesis yang disampaikan oleh Sugiyono (2012: 93), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini yang diajukan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal baik secara simultan maupun secara parsial.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Menurut Umar (2008:4), “Desain penelitian adalah suatu cetak biru (*blue print*) dalam hal bagaimana

data dikumpulkan, diukur, dan dianalisis.” Tujuan dengan adanya desain penelitian yaitu agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan yang diharapkan, sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2011:39) “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam suatu variabel penelitian memiliki batasan mengenai variabel terikat dan variabel bebas.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Sugiyono (2011: 39) mengartikan variabel bebas sebagai “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Y)”. Untuk variabel bebas (*Independent Variable*) (X) pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2011: 40) “Variabel dependen atau variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011: 81), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah setingkat Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia sebanyak 416 kabupaten dan 98 kota. Total populasi keseluruhan sebanyak 514.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011: 82) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2011: 86) “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Seluruh Kota dan Kabupaten se-Indonesia yang terdaftar didalam laporan tahunan APBD periode 2012-2014.
- b. Kota dan Kabupaten se-Indonesia selalu menyajikan laporan tahunan APBD lengkap termasuk adanya data PAD, DAU dan Belanja Modal periode 2012-2014. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sejumlah 318 kota dan kabupaten selama tiga tahun dari periode 2012 sampai 2014 sehingga data yang digunakan berupa data panel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan dari data sekunder karena data yang diperoleh tidak dihipung secara langsung oleh peneliti, namun diperoleh dari pihak lain dan merupakan data yang sudah diolah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dengan menggunakan metode dokumentasi peneliti memperoleh data mengenai APBD yang memuat data realisasi PAD dana DAU serta Belanja Modal tahun anggaran 2012-2014 kabupaten dan kota se Indonesia yang mencantumkan laporan realisasi APBD pada tahun 2012-2014 yang diperoleh dari www.djpk.kemkeu.go.id

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menurut Sanusi (2013:115), adalah mendeskripsikan teknik analisis yang digunakan peneliti termasuk pengujian data tersebut. Analisis data digunakan peneliti agar lebih mudah dibaca dan dipahami dengan cara merubah atau menyederhanakan data.

A. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011:148) statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan mengenai besar dan kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dana Dana Alokasi Umum yang berkontribusi, serta rata-rata alokasi Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun nilai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Nilai Maksimum
- b) Nilai Minimum
- c) Rata-rata (*Mean*)

B. Analisis Inferensial

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam pemodelan analisis regresi dengan tujuan untuk mendapatkan model regresi yang benar-benar baik dan mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai kaidah *best, linier, unbiased* dan *estimator* (BLUE). Adapun pengujian yang diperlukan adalah :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai nilai data yang terdistribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan *Jarque-Bera Test*.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013 : 105) “Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas atau tidak.” Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang telah diajukan telah ditemukan korelasi yang kuat antarvariabel independen. Jika terdapat korelasi yang kuat, maka asumsi klasik tidak terpenuhi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Umar,

2008:84). Jika varians dari suatu residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, disebut homoskedastisitas. Sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam analisis regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antardata yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2008:86). Model regresi yang baik adalah model analisis yang terbebas dari autokorelasi. Dalam penelitian kali ini, model yang akan digunakan dalam pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson.

Analisis Regresi Data Panel

Data dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Dimana data *cross section*, merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyaknya individu. Sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu (Nachrowi & Usman, 2006: 310).

Menurut Rohmana (2013:241) terdapat tiga uji yang digunakan untuk memilih ketiga teknik analisis regresi data panel manakah yang paling cocok digunakan apakah *common effect, fixed effect* atau *random effect*.

Pemilihan Model Akhir

Setelah menganalisa model regresi data panel dengan tiga model yaitu *common effect model, fixed effect model* dan *random effect model*, selanjutnya dilakukan pemilihan model yang paling cocok dalam penelitian ini menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange-Multiplier. Berikut hasil pengujian ketiga model tersebut:

- 1) Uji F atau Uji Chow
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah regresi data panel menggunakan *fixed effect method* lebih baik daripada menggunakan *common effect method*.
- 2) Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode pendekatan *Fixed Effect* atau *Random Effect* (Ajija, dkk., 2011:53) Dengan mengikuti kriteria Wald.
- 3) Uji Langrange Multiplier
Menurut Rohmana (2013:243) uji *Langrange Multiplier* (uji LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random effect* atau

common effect yang paling baik untuk digunakan.

Dalam pengujian ketiga model ini, jika pada uji Chow dan Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *fixed effect*, maka tidak diperlukan Uji LM. Uji LM digunakan jika Uji Chow menunjukkan model yang paling tepat adalah *common effect*, sedangkan pada Uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *random effect model*.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yang mana dilakukan dengan uji statistik t (*t-test*) dan uji statistik F (*F-test*) dengan tingkat signifikansi (α) 5% atau 0.05.

a. Pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F)

Uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan, yaitu melihat apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

b. Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t)

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan maka selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu. Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. (Rohmana, 2010:74)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa setiap tahunnya setiap pulau di Indonesia mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kecuali Kepulauan Maluku pada tahun 2014 mengalami penurunan. Pulau Jawa adalah penghasil pendapatan asli daerah tertinggi setiap tahunnya dibandingkan Pulau yang lainnya, dikarenakan Pulau Jawa, Pulau dengan populasi terbanyak sekitar 160.293.748, itu berarti lebih banyak rakyat yang membayar pajak. Lebih banyak tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dari luar Pulau Jawa dan itu semua didominasi dari sektor Pajak daerah kemudian disusul retribusi, lain-lain PAD yang sah dan yang terakhir dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Maka dalam penelitian ini pun sektor pajak dan retribusi masih memberikan kontribusi yang utama bagi PAD, meskipun tidak semua daerah mengandalkan pajak dan sektor retribusi sebagai sektor utama. Peningkatan pendapatan diluar pajak dan retribusi, diharapkan dapat membantu masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia untuk lebih meningkatkan pendapatan dari sektor PAD. Adapun Pulau yang menghasilkan PAD terendah yaitu Kepulauan Maluku, karena jumlah penduduknya yang lebih sedikit dibandingkan Pulau lain. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi atau otonomi daerah. Pendapatan asli daerah beberapa kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, hal ini menunjukkan bahwa sistem otonomi daerah atau desentralisasi telah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Di samping itu, bahwa kabupaten/kota setiap tahunnya ada yang mengalami peningkatan ataupun penurunan pendapatan asli daerah. Selain itu jika dilihat dari keseluruhan kabupaten/kota se-Indonesia, gambaran pendapatan asli daerah dapat dilihat (dilampiran) adapun deskripsinya, yaitu

1. Pada tahun 2012 Kabupaten Mimika mendapatkan pendapatan asli daerah terbesar sebanyak Rp344.615.000.000, lalu pada tahun 2013 Kota Bandar Lampung mendapatkan pendapatan asli daerah terbesar sebanyak Rp360.698.000.000 dan pada tahun 2014 Kabupaten Gianyar mendapatkan pendapatan asli daerah terbesar sebanyak Rp424.782.000.000.

Kabupaten Mimika, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Gianyar penghasil pendapatan asli daerah terbesar pada tahun anggaran 2012-2014 mengandalkan pajak daerah dan retribusi daerah untuk penghasil terbesar di dalam pendapatan asli daerah. Karena pemerintah daerah setempat terus meningkatkan inisiatif dan kreatifitasnya dengan melakukan usaha yang konkrit dan konstitusional untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

2. Pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2012 diperoleh Kabupaten Mamasa sebesar Rp7.713.000.000, lalu pada tahun 2013 pendapatan asli daerah terendah diperoleh Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp8.707.000.000 dan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2014 diperoleh Kabupaten Keerom sebesar Rp9.168.000.000.

Kabupaten Mamasa, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Keerom menjadi kabupaten/kota penghasil pendapatan asli daerah terkecil tahun anggaran 2012-2014 ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
 - b. Keterbatasan infrastruktur sehingga menghambat sektor ekonomi
 - c. Kurang menggali potensi daerahnya untuk menghasilkan PAD lebih banyak lagi.
3. Pada tahun 2012 dengan rata-rata Rp59.261.000.000 hanya 113 kabupaten/kota dari 318 kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan asli daerah di atas rata-rata, lalu pada tahun 2013 kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan asli daerah di atas rata-rata Rp72.845.000.000 meningkat menjadi 116 kabupaten/kota. Dan pada tahun 2014 kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan asli daerah di atas rata-rata Rp108.129.000.000 meningkat kembali menjadi 119 kabupaten/kota.

Dari 318 Kabupaten/kota paling banyak 119 kabupaten/kota yang memperoleh PAD di atas rata-rata berarti masih ada sekitar 199 kabupaten/kota yang memperoleh PAD dibawah rata-rata. Menurut Widayat (1994:31) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah :

- a) Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
- d) Adanya kebocoran-kebocoran;
- e) Biaya pungut yang masih tinggi;
- f) Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- g) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Dapat dilihat dari gambar yang ada di www.keuda.kemendagri.go.id bahwa pendapatan asli daerah selalu rendah setiap tahunnya, rasioa pendapatan asli daerah terhadap pendapatan masih terbilang rendah, pada tahun 2012 hanya 16% PAD

terhadap pendapatan daerah, 2013 hanya 16,4% dan 2014 hanya 17,3%. Provinsi penghasil PAD terbesar pada tahun 2012 dihasilkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, lalu pada tahun 2013 PAD terbesar dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dan pada tahun 2014 PAD terbesar dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dapat disimpulkan bawah hampir seluruh daerah di Indonesia belum mandiri.

Dapat dilihat pada gambar 1.2, bahwa dana alokasi umum masih mendominasi dibandingkan pendapatan asli daerah. Pulau Jawa yang terbesar mendapatkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Kepulauan Maluku yang mendapatkan dana alokasi umum terendah. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan bantuan dari dana pemerintah pusat berupa DAU untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi. Kondisi ini tidak ideal mengingat dalam pelaksanaannya jika semakin tinggi DAU maka tingkat ketergantungan daerah pusat akan semakin tinggi seharusnya pemerintah daerah memaksimalkan PAD-nya sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat rendah.

Peningkatan penerimaan DAU terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana transfer DAU. Semakin tinggi celah fiskal yang ada maka akan semakin tinggi DAU yang diterima. Sebenarnya pemerintah daerah harus dan bisa meminimalisir celah fiskal tersebut yang salah satunya dapat dilakukan dengan penggalian potensi daerah masing-masing sebagai sumber PAD yang lebih besar. Selain itu jika dilihat dari keseluruhan kabupaten/kota se-Indonesia, gambaran dana alokasi umum dapat dilihat (dilampiran) adapun deskripsinya, yaitu:

1. Pada Tahun 2012 Dana Alokasi Umum terbesar diperoleh Kabupaten Klaten sebesar Rp967.285.000.000, lalu pada tahun 2013 dana alokasi umum terbesar diperoleh Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp1.104.926.000.000 dan pada tahun 2014 dana alokasi umum terbesar diperoleh Kabupaten Kediri sebesar Rp1.144.879.000.000

Dana Alokasi Umum dialokasikan berdasarkan kebutuhan fiskal pada masing-masing daerah di Indonesia. Kebutuhan fiskal pada setiap daerah diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK),

Produk Domestik Bruto Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingginya Dana Alokasi Umum ini disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga Pemda membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum.

2. Dana Alokasi Umum terendah pada tahun 2012 diperoleh Kabupaten Karimun sebesar Rp246.833.000.000, lalu pada tahun 2013 dana alokasi umum terendah diperoleh Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp272.959.000.000 dan dana alokasi umum terendah pada tahun 2014 diperoleh Kabupaten Morowali sebesar Rp286.764.000.000.

Dana Alokasi Umum rendah itu mengartikan bahwa beberapa kabupaten/kota sudah dapat menggali potensi pendapatan asli daerah dengan baik sehingga hanya memerlukan sedikit bantuan saja dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum tersebut

3. Pada tahun 2012 dengan rata-rata Rp501.172.000.000 ada sekitar 135 kabupaten/kota dari 318 kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi umum di atas rata-rata, lalu pada tahun 2013 kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi umum di atas rata-rata Rp568.897.000.000 menurun menjadi 130 kabupaten/kota. Dan pada tahun 2014 kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi umum di atas rata-rata Rp615.528.000.000 meningkat kembali menjadi 132 kabupaten/kota.

Kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi umum di atas rata-rata ada sebanyak 135 kabupaten/kota berarti ada sekitar 183 kabupaten/kota yang dana alokasi umumnya berada dibawah rata-rata. Dapat disimpulkan bahwa sudah banyak kabupaten/kota yang dapat menggali potensi keuangan daerahnya masing-masing tanpa harus bergantung banyak kepada keuangan pemerintah pusat.

Dapat dilihat dari gambar yang ada di www.keuda.kemendagri.go.id dapat dilihat bahwa dana perimbangan yang didalamnya ada dana alokasi umum itu lebih mendominasi dibandingkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Berarti dapat disimpulkan bawah hampir keseluruhan Pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota masih bergantung kepada keuangan pemerintah pusat.

Dapat dilihat pada gambar 1.3 bahwa disetiap pulau di Indonesia pada tahun 2012-2014 belanja modal selalu mengalami peningkatan, belanja modal terbesar dihasilkan oleh Pulau Sumatera setiap tahunnya, padahal PAD dan DAU terbesar diperoleh Pulau Jawa. Belanja modal terendah dihasilkan oleh kepulauan Maluku.

Selain itu jika dilihat dari keseluruhan kabupaten/kota se-Indonesia, gambaran belanja modal dapat dilihat (dilampiran) adapun deskripsinya, yaitu:

1. Pada Tahun 2012 belanja modal terbesar diperoleh Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp480.619.000.000, lalu pada tahun 2013 dan 2014 belanja modal terbesar diperoleh Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp534.436.000.000 dan Rp650.618.000.000.

Kabupaten/kota yang memperoleh belanja modal terbesar berarti kabupaten/kota tersebut sudah dapat menggali potensi keuangan daerahnya dan mengutamakan keuangan daerahnya untuk belanja modal. Ataupun disebabkan Kabupaten/kota yang memperoleh belanja modal terbesar merupakan salah satu kabupaten penyangga ibukota negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga memerlukan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang tinggi.

2. Belanja modal terendah pada tahun 2012 dan 2014 diperoleh Kota Gorontalo sebesar Rp64.056.000.000 dan Rp75.922.000.000, lalu pada tahun 2013 dana alokasi umum terendah diperoleh Kota Sabang sebesar Rp62.346.000.000.

Adapun kabupaten/kota yang belanja modalnya masih tergolong rendah, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a) Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya Sumber Daya Aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan;
- b) Adanya Alokasi dana dari pusat yang disampaikan ke berbagai instansi pemerintah kabupaten, pemberitahuan mengenai alokasi dana dari program kegiatan dimaksud sering mengalami keterlambatan;
- c) Keuangan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dengan prosentase PAD sangat kecil terhadap APBD.

3. Pada tahun 2012 dengan rata-rata Rp163.520.000.000 ada sekitar 135 kabupaten/kota dari 318 kabupaten/kota yang memperoleh belanja modal di atas rata-rata, lalu pada tahun 2013 kabupaten/kota yang memperoleh belanja modal di atas rata-rata Rp196.862.000.000 menurun menjadi 134 kabupaten/kota. Dan pada tahun 2014 kabupaten/kota yang memperoleh belanja modal di atas rata-rata Rp225.427.000.000 menurun kembali menjadi 127 kabupaten/kota. Setiap tahunnya belanja modal yang berada di atas rata-rata hanya diperoleh paling banyak 135 kabupaten/kota itu berarti masih ada sekitar 183 kabupaten/kota yang belanja modalnya dibawah rata-rata.

Dapat dilihat dari gambar yang ada di www.keuda.kemendagri.go.id bahwa rasio belanja modal terhadap belanja daerah memang masih rendah, pada tahun 2012 rata-rata belanja modal yang diperoleh hanya sekitar 23%, lalu pada tahun 2013 hanya memperoleh sebesar 24% dan pada tahun 2014 hanya memperoleh 25%. Provinsi Kalimantan yang memperoleh belanja modal terbesar pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 40,5% dan 40,3%, lalu pada tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta memperoleh belanja modal terbesar 44,8%

Beralih ke pembahasan secara statistik, berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan, secara parsial, pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal pada kabupaten/kota se-Indonesia tahun anggaran 2012-2014 diperoleh nilai t_{hitung} untuk (X_1) sebesar 6,517 dan t_{tabel} 1,962. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014. Maka berdasarkan pengujian pada penelitian ini terbukti bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat pendapatan asli daerah dengan belanja modal pada kabupaten/kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Ikin Solikin (2007) dan Nugroho Suratno Putro (2010) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Secara teoritis pendapatan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Namun, untuk kasus pemerintah daerah di Indonesia, persentase tersebut hanya sekitar 5-7%

dari total penerimaan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan, secara parsial, hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2012-2014 diperoleh nilai t_{hitung} untuk X_2 sebesar 11,031 dan t_{tabel} 1,962. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2012-2014. Maka berdasarkan pengujian pada penelitian ini terbukti bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2012-2014.

Hasil penelitian ini hampir serupa dengan penelitian Ikin Solikin (2007) dan Nugroho Suratno Putro (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan pula bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Holtz-Eakin et al (dalam Hariyanto dan Adi, 2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Kemudian Gamkhar dan Oates (dalam Maimunah, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, secara simultan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota se-Indonesia tahun anggaran 2012-2014 diketahui nilai F_{hitung} sebesar 11,895 dengan p -value (sig) 0,000. Dengan $\alpha=0,05$ serta derajat kebebasan $v_1 = 318$ ($n - (k+1)$) dan $v_2 = 2$, maka di dapat F_{tabel} 3,403. Dikarenakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,895 > 3,005$) maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2012-2014. Maka berdasarkan pengujian pada penelitian ini terbukti bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan belanja modal pada Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2012-2014.

Uji Normalitas

Maka bila hasil *chi kuadrat* hitung (χ^2_{hitung}) ini dikonsultasikan dengan nilai tabel *chi kuadrat* dengan $dk = n-k-1$, dimana $k=3$, maka $dk = 145-3-1$ dan taraf nyata 5% maka diperoleh *chi kuadrat* tabel (χ^2_{tabel}). Kesimpulan yang diambil adalah dengan membandingkan (χ^2_{hitung}) dengan (χ^2_{tabel}) :

- 1) Jika nilai (χ^2_{hitung}) \leq nilai (χ^2_{tabel}), maka data berdistribusi normal
- 2) Jika nilai (χ^2_{hitung}) $>$ nilai (χ^2_{tabel}), maka data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan uji JB pada gambar 1.4 nilai JB hitung sebesar 21,63 sedangkan Chi Square dengan $k=2$, maka $dk = n-k-1 = 954-2-1 = 951$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 1022,816 dengan demikian nilai (χ^2_{hitung}) \leq nilai (χ^2_{tabel}), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan data memenuhi persyaratan untuk menggunakan menggunakan statistik parametrik.

Uji Multikolinieritas

Dari tabel 1.3 dapat dilihat angka koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0,8, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak ada masalah multikolinieritas dan dapat dipakai dalam statistik parametrik.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, menurut Ghazali (2013:139). Dasar pengambilan keputusan uji tersebut yaitu:

- a) Jika ada titik-titik yang membentuk pola membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan adanya heterokedastisitas.
- b) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilihat dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (DW) dan nilai dL dan dU dalam tabel Durbin Watson dengan taraf signifikansi 5%, $n=954$ dan $k=2$ yaitu masing-masing sebesar 1,89127 dan 1,89548.

Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Jika $d < dL$, berarti terdapat autokorelasi positif
- 2) Jika $d > (4-dL)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
- 3) Jika $dU < d < (4-dL)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
- 4) Jika $dL < d < dU$ atau $(4-dU)$, berarti tidak dapat diambil kesimpulan

Pada tabel 4.23 terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 2,66643 yang artinya $1.89548 < 2,66643 < (4-1,89127)$ sehingga dapat disimpulkan data penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

Hasil Pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F)

Berikut hasil pengolahan uji keberartian regresi (Uji F) dengan menggunakan *Eviews* versi 8:

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dengan langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : $\beta_1 = \beta_2$, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal

H_1 : $\beta_1 \neq \beta_2$, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

b. Menentukan nilai F

Dari pengolahan data menggunakan *Eviews* versi 8 dihasilkan nilai F_{hitung} sebesar 11,89533. Sedangkan nilai F_{tabel} dari tingkat signifikansi 5% dengan $k = 2$ dan $dk = 954-2-1 = 951$ ($n-k-1$) maka nilai F_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 3,005198 .

c. Kriteria Pengujian

- Jika nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1 ditolak
- Jika nilai $F_{hitung} \leq$ nilai F_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 diterima

d. Hasil Pengujian

Dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , yaitu $13,8223 > 3,005198$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan.

Adapun hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 $H_0: \beta_1 = 0$, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
 $H_1: \beta_1 \neq 0$, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 $H_0: \beta_2 = 0$, dana alokasi umum daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
 $H_1: \beta_2 \neq 0$, dana alokasi umum daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Setelah mendapat nilai t , nilai t_{hitung} lalu dibandingkan dengan t_{tabel} (taraf signifikansi 5%) dengan ketentuan kriteria keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 318 ($n - (k+1)$) didapat nilai $t_{tabel} 1,962$. Hasil uji signifikansi t untuk Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa untuk Pendapatan Asli Daerah (X_1) dalam tabel 1.6 besarnya nilai t_{hitung} untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar $6,517 > 1,962$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 318 ($n - (k+1)$) didapat nilai $t_{tabel} 1,962$. Hasil uji signifikansi t untuk Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa untuk Dana Alokasi Umum (X_2) dalam tabel 4.14 besarnya nilai t_{hitung} untuk Dana Alokasi Umum sebesar $11,031 >$

$1,962$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan kenaikan ataupun penurunan setiap tahunnya, baik setara kabupaten/kota, provinsi ataupun pulau. Masih banyak Kabupaten dan Kota yang berada dibawah jumlah rata-rata. Gambaran Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya mengalami peningkatan di kabupaten/kota se-Indonesia. Gambaran Belanja Modal menunjukkan adanya peningkatan ataupun penurunan di kabupaten/kota se-Indonesia
2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal.
3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal.
4. Dari hasil pengujian simultan yang dilakukan penulis membuktikan adanya pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H. dan Primanti M. R.. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap*

- Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26 – 28 Juli 2007.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004) *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harianto, D dan Adi, P. H. (2007) *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. “Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Rohmana, Y. (2013). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi FPEB UPI.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soleh, C dan Rochmansjah, H. (2010) *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Tuasikal, A. (2008) *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 2. Hal.142-155
- Umar, H. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonosia
- Widayat, Wahyu, 1994, Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daereah, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34.
- www.djpk.depkeu.go.id
- www.keuda.kemendagri.go.id

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1.1

Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja pada Kab/Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2012-2014

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Persentase Belanja Modal/Total Belanja
2012	129.478.329	580.612.720	22,30%
2013	177.477.715	675.124.292	26,29%
2014	200.654.903	878.723.533	22,83%
		Jumlah	71,42%
		Rata-rata	23,81%

Diolah dari www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 1.2

Total PAD, DAU dan Belanja Modal setiap Pulau

(dalam Jutaan Rupiah)

Pulau	Tahun	PAD	DAU	Belanja Modal
Sumatera	2012	4,140,797	43,439,662	15,648,118
	2013	5,181,200	49,754,592	19,858,411
	2014	7,566,856	53,555,937	21,080,279
Jawa	2012	8,193,501	50,045,635	13,691,098
	2013	10,066,815	56,631,348	14,928,115
	2014	15,340,170	61,034,596	18,989,132
Nusa Tenggara	2012	1,686,845	12,740,144	3,612,340
	2013	2,074,638	14,308,007	4,254,759
	2014	2,974,062	15,820,694	4,579,200
Kalimantan	2012	1,766,301	16,111,019	6,653,330
	2013	2,181,463	18,136,150	8,766,219
	2014	3,085,900	19,713,982	9,800,312
Sulawesi	2012	1,922,045	23,517,173	6,880,558
	2013	2,491,257	26,814,552	8,607,786
	2014	3,847,465	28,741,957	9,880,001
Maluku	2012	336,710	3,559,695	1,196,061
	2013	445,821	4,026,423	1,458,312
	2014	427,532	4,539,549	1,572,301

Papua	2012	798,640	9,959,352	4,481,227
	2013	723,416	11,238,050	4,925,494
	2014	1,142,972	12,331,282	6,009,915

Sumber Data : www.djpk.depkeu.go.id (diolah)

Tabel 1.3

Hasil Uji Multikolinieritas

	PAD	DAU
PAD	1.000000	0.652261
DAU	0.652261	1.000000

Sumber: Output Eviews 8

Tabel 1.4

Uji Autokorelasi

Mean dependent var	12.09753
S.D. dependent var	0.414199
Akaike info criterion	-0.198924
Schwarz criterion	1.431487
Hannan-Quinn criter.	0.422161
Durbin-Watson stat	2.666435

Sumber : Output Eviews 8

Tabel 1.5

Uji Koefisien Regresi (Uji F)

R-squared	0.856840
Adjusted R-squared	0.784808
S.E. of regression	0.192142
Sum squared resid	23.40625
Log likelihood	414.8867
F-statistic	11.89533
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 8

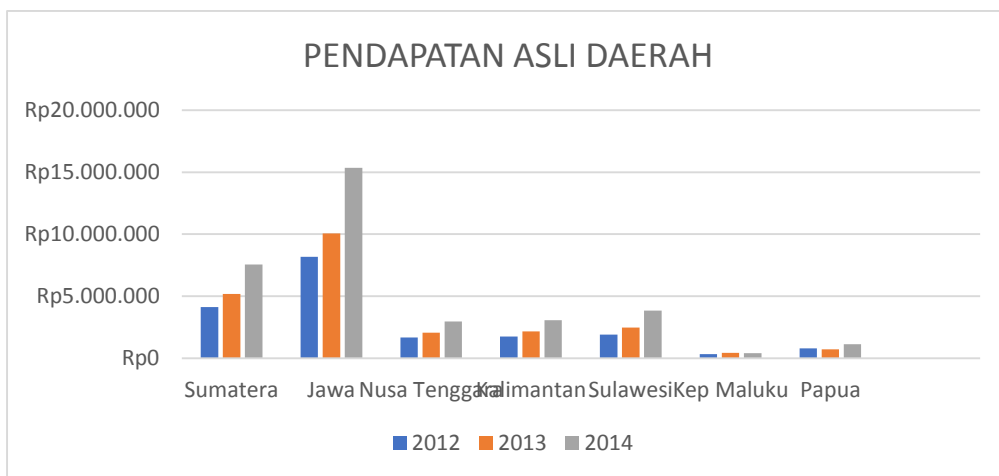
Tabel 1.6
Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Sumber: Eviews Output 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	t-tabel	Prob.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.185122	0.028405			0.0000
Dana Alokasi Umum (DAU)	0.976414	0.088515	11.03112	1.962462	0.0000

Gambar 1.1

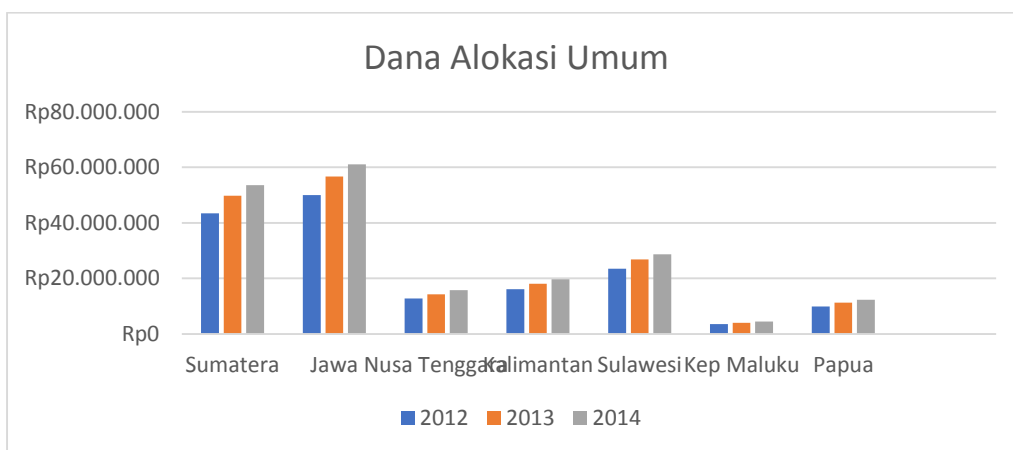
Hubungan Antar Variabel Penelitian



(sumber data: tabel 1.2)

Gambar 1.2

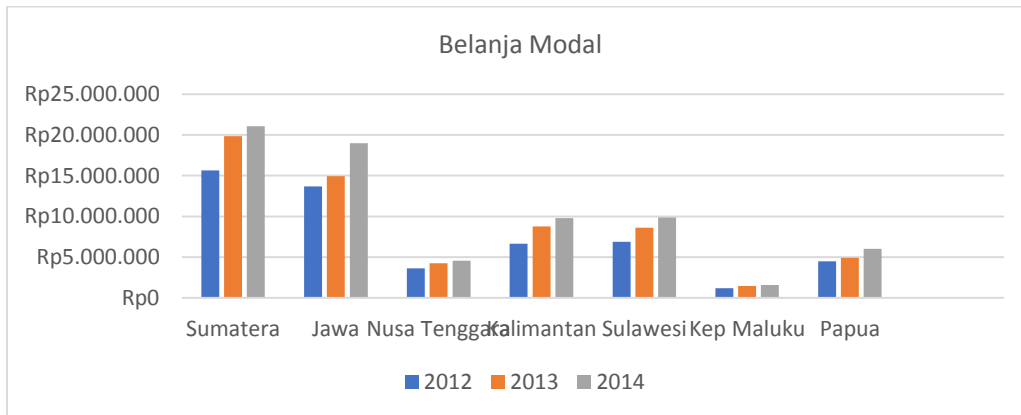
Grafik PAD setiap Pulau di Indonesia tahun 2012-2014



(sumber data: tabel 1.2)

Gambar 1.3

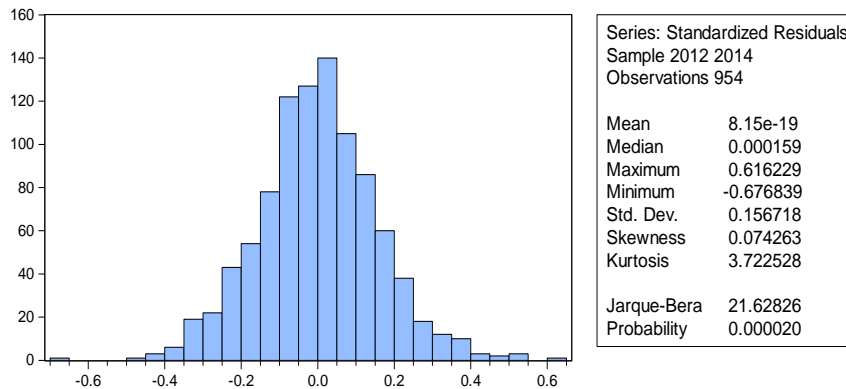
Grafik DAU setiap Pulau di Indonesia tahun 2012-2014



(sumber data: tabel 1.2)

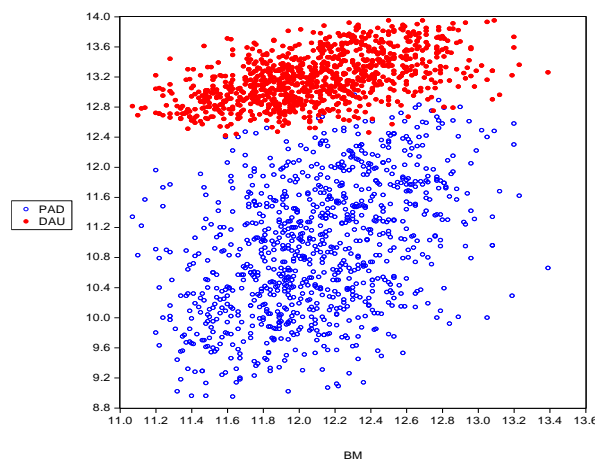
Gambar 1.4

Grafik Belanja Modal setiap Pulau di Indonesia tahun 2012-2014



Gambar 1.5

Grafik Uji Normalitas



Gambar 1.6

Grafik Scatter Plots (Uji Heteroskedastisitas)